

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak secara umum yaitu iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama dengan tanpa balas jasa yang ditunjukan secara tidak langsung maupun langsung oleh Pemerintah.

Pajak memiliki peran penting selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak penghasilan orang pribadi juga sebagai salah satu rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif pajak penghasilannya.

Semakin majunya taraf kehidupan masyarakat di perkotaan sejalan dengan semakin padatnya kendaraan bermotor sehingga perlu diatur. Peraturan-peraturan yang konsisten dan efektif sangat diperlukan sebagai alat kendali penggunaan kendaraan bermotor oleh pemiliknya. Upaya pengendalian penambahan jumlah kendaraan bermotor bisa berjalan efektif bergantung seberapa sempurna perangkat aturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat demikian juga Kota Krian di Provinsi Jawa Timur.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor selain bertujuan untuk menekan atau mengurangi jumlah kendaraan dalam kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Maka kebijakan penerapan Pajak Kendaraan Progresif akan mampu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar dan juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Sebagian besar warga di Kota Krian belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan tidak sedikit permasalahan pada saat warga membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Mereka seringkali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu. Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik pertama telat menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, pungutan pajak progresif kendaraan di Jawa Timur diterapkan mulai 3 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terkait beberapa titik penting dengan keseimbangan kebijakan baru pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dapat digunakan oleh semua masyarakat.

- Pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor pribadi roda 4 dan kendaraan bermotor roda 2 dengan isi 250 cc ke atas, untuk keperluan kedua dan seterusnya, dikenakan tarif 2% sampai 3,5%.
- Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 dengan usia 25 tahun ke atas NJKB 50% sehingga pembayaran PKB naik separuhnya.
- Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Pemerintah, TNI / POLRI sebesar 0,5%.

- Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Baru sebesar 15%.
- Kendaraan Bermotor untuk Alat besar, alat pembayaran PKB melalui KB SAMSAT Provinsi Jawa Timur.

Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor tergantung pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Semakin banyak peningkatan dari tahun ke tahun maka penghasilan pajak progresif kendaraan bermotor akan meningkat. Pengenaan pajak progresif ini, diharapkan bisa digunakan untuk pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Tujuan utama dari diterapkannya pajak progresif kendaraan bermotor ini adalah untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi sehingga harapannya masyarakat akan berfikir ulang untuk memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

1. Tugas Akhir Andika Nur Alfian yang berjudul “MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR BERSAMA SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAH SATU ATAP (SAMSAT) MANYAR SURABAYA TIMUR” -2018

2. Tugas Akhir Erlin Christiani Fransina Nubatonis yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA” - 2018

Berdasarkan berbagai jurnal diatas yang penulis ambil untuk meneliti lebih dalam mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“PENERAPAN PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KRIAN”**

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kantor Bersama Samsat Krian.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Adanya yang menjadi manfaat setelah melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai peningkatan penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor. Dapat menambah wawasan dalam penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor.

2. Manfaat bagi universitas

Hasil kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan dalam ilmu perpajakan khususnya pajak progresif.

3. Manfaat bagi kantor bersama samsat krian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu meringankan pemikiran dan energi kepada kantor bersama samsat krian, khususnya pekerjaan umum untuk memberikan pelayanan Pajak Progresif yang lebih baik kepada masyarakat.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap hasil penulisan ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan penelitian bagi peneliti berikutnya, khususnya yang berhubungan dengan Pajak Progresif.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup ini adalah pembahasan suatu masalah yang kompleks dan terkait agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan dapat membantu dalam pemecahan permasalahan maka penulis membatasi penelitian ini pada Penerapan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kantor Bersama Samsat Krian.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam tugas akhir ini, metode pengumpulan data adalah salah satu guna untuk mencapai tujuan penulisan. Ada tiga metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber data. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau subjek penelitian yaitu UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kota Sidoarjo.

Wawancara ini guna untuk mengenai aspek-aspek apa saja yang harus dibahas. Pewawancara harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Pertanyaan yang diberikan sebagai berikut:

1. Mengapa anda ingin melaksanakan penelitian di UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kota Sidoarjo?
2. Berapa lama anda akan melaksanakan penelitian di UPT Pengelolaan Pajak Daerah Kota Sidoarjo?

b. Observasi

Metode observasi yang kami teliti ini dengan menggunakan metode observasi langsung, dan mengamati objek untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pada Kantor Bersama Samsat Krian.

Serta dapat melakukan penyesuaian data yang telah dioperasi sebelumnya dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara arsip atau dokumen yang terdapat pada Kantor Besama Samsat Krian yang berkaitan dengan Pajak Progresif dan dijadikan acuan untuk penulisan tugas akhir.